



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **(LKjIP)** Tahun 2022

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Pasaman Barat**

# KATA PENGANTAR

---

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rahmat dan izin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 telah selesai disusun.

Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategis berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi data, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan kepada Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Pada Tahun Anggaran 2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan 28 sub kegiatan dalam 12 kegiatan dengan 6 program, dimana sebagian besar kegiatan terlaksana dengan sangat baik dan ada kegiatan yang capaiannya kurang baik. Mengenai capaian indikator kinerja akan diuraikan dalam Bab-bab Laporan ini.

Segala keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat akan tetap dipertahankan dan diusahakan supaya lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Sedangkan terhadap kelemahan-kelemahan/ hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

Simpang Empat, Februari 2023  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Kabupaten Pasaman Barat



DEFIRAWAN, S.Pd  
NIP. 197508312006042005

# RINGKASAN EKSEKUTIF

---

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan aturan pelaksanaan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target kinerja yang harus dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat .

**Capaian Indikator Kinerja Utama  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Rasio Capaian (%)
1	Persentase konflik sosial yang ditangani	100%	100	100
2	Persentase masyarakat yang paham tentang wawasan kebangsaan	5%	0,03	1
3	Persentase Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan	25%	60	100
4	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	68%	68	100
5	Nilai SAKIP Kesbangpol	C	BB	100
6	Level Maturitas SPIP Kesbangpol	Level 2	Level 3	100
7	Persentase Penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Kesbangpol	50	50	100

# DAFTAR ISI

---

I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Badan Kesbangpol	2
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan	8
1.4. Isu Strategis	8
II. PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis 2021 – 2026	10
2.1.1. Pernyataan Visi dan Misi	10
2.1.2. Tujuan Strategis	13
2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
2.2. Perjanjian Kinerja	15
2.3. Program Kegiatan dan Anggaran	17
III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	19
3.1.1. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kesbangpol	23
A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	23
B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021	24
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Badan Kesbangpol	26
D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
E. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	27
3.1.2. Sasaran Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Nyaman	29
A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	30
B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021	31
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Badan Kesbangpol	32
D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
E. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	35
3.1.3. Sasaran Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang kehidupan berpolitik	38
A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	38

B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021	40
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Badan Kesbangpol	40
D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41
E. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	42
3.2. Realisasi Anggaran	43
IV. PENUTUP	44

## DAFTAR TABEL

---

Tabel 1.	Data Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	5
Tabel 2.	Data Pegawai Menurut Golongan dan Pendidikan	6
Tabel 3.	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati	11
Tabel 4.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	16
Tabel 6.	Perjanjian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022	17
Tabel 7.	Program/Kegiatan dan Anggaran	17
Tabel 8.	Skala Pengukuran Kinerja	19
Tabel 9.	Capaian Indikator Kinerja Utama	20
Tabel 10.	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama	20
Tabel 11.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Badan Kesbangpol	21
Tabel 12.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Realisasi Program dan Anggaran	22
Tabel 13.	Capaian Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja kesbangpol	23
Tabel 14.	Perbandingan Realisasi Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kesbangpol Tahun 2021 - 2026	25
Tabel 15.	Perbandingan Realisasi Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kesbangpol Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Badan Kesbangpol	26
Tabel 16.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kesbangpol	27
Tabel 17	Capaian Sasaran Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Nyaman	30
Tabel 18	Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Nyaman Tahun 2021 - 2026	31
Tabel 19	Perbandingan Realisasi Sasaran Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Nyaman Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Badan Kesbangpol	32
Tabel 20	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Nyaman	35
Tabel 21	Capaian Persentase Partisipasi Masyarakat dalam pemilu	40
Tabel 22	Perbandingan Realisasi Capaian Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam pemilu Tahun 2021 - 2026	41
Tabel 23	Perbandingan Realisasi Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang	

	Terdapat Dalam Dokumen Renstra Badan Kesbangpol	42
<b>Tabel 24</b>	<b>Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Persentase Partisipasi masyarakat dalam pemilu</b>	<b>44</b>
<b>Tabel 25</b>	<b>Realisasi Program dan Anggaran</b>	<b>46</b>

## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 1.	Cascading Renstra Badan Kesbangpol	3
Gambar 2.	Cascading Program Badan Kesbangpol	4
Gambar 3.	Data Distribusi Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin	5
Gambar 4.	Data Distribusi Pegawai Menurut Pendidikan	6

# I. PENDAHULUAN

---

## 1.1. Latar Belakang

Setiap pelaksanaan urusan kepemerintahan akan selalu dikaitkan dengan pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tiga pilar utama yaitu, Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas merupakan salah satu azas dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana azas tersebut memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Subtansi dari SAKIP itu sendiri adalah menyelaraskan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan berorientasi pada hasil (*result oriented*). Penyelarasan dilakukan mulai dengan penyusunan Rencana Strategik dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kerja Tahunan / Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak kerja serta kaporan pertanggungjawaban setiap tahunnya.

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan aturan pelaksanaan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target kinerja yang harus dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat .

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat ;

2. Mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

## 1.2. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

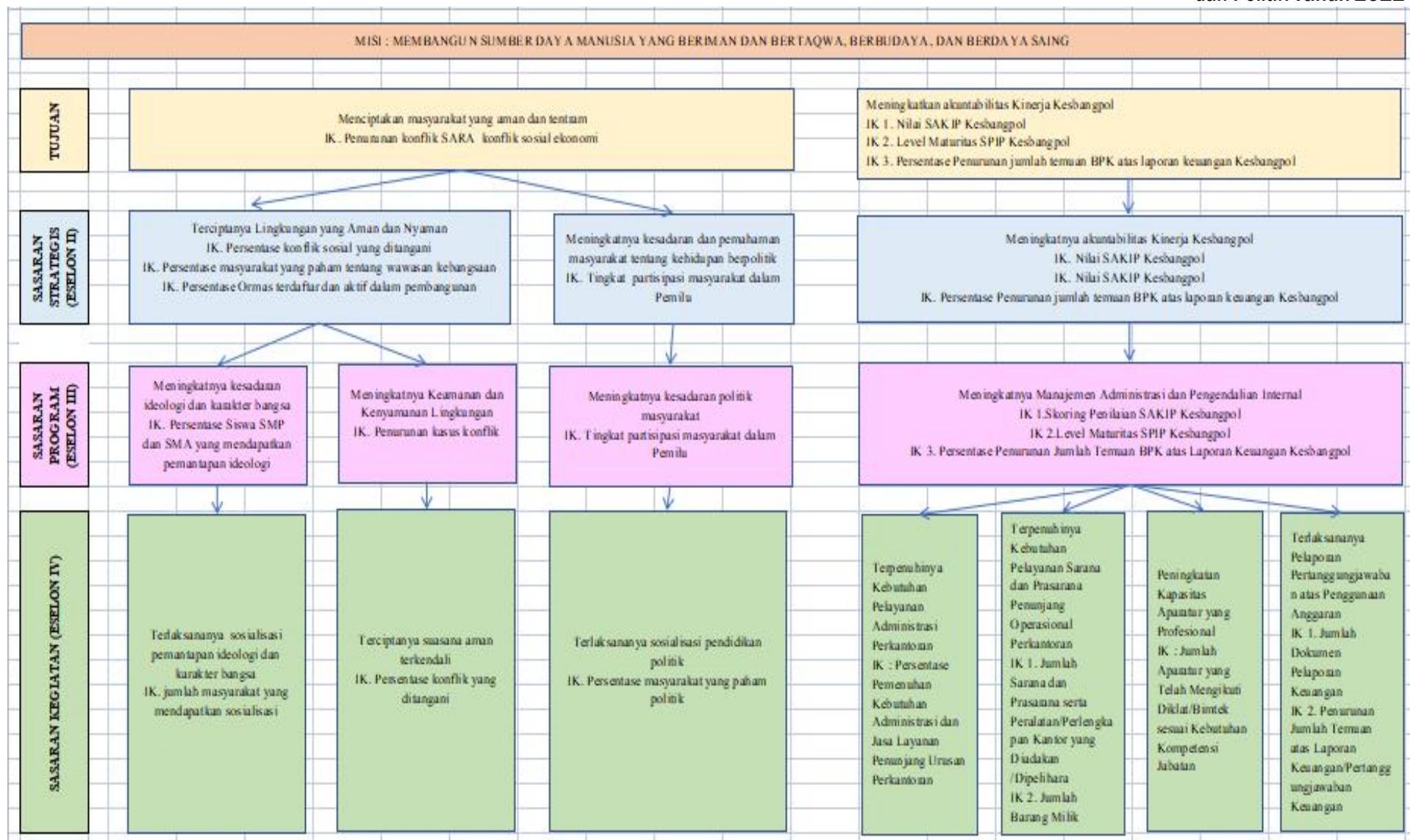
### 1.2.1. Cascading Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaras dengan paradigma *Performance Based Organization* (organisasi berbasis kinerja), maka setiap perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan. *Cascading Kinerja* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat merupakan bentuk keseriusan dalam upaya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2022. Sehingga kedepannya dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berdasarkan kinerja yang berorientasi kepada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan bagi kesejahteraan sumber daya aparatur.

Tujuan *Cascading Kinerja* adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan yang dapat meningkatkan kinerja instansi di level strategis maupun operasional.
2. Membantu Instansi, Kementerian atau Lembaga Indonesia agar dapat Menyusun perencanaan kerja secara benar dan rinci berdasarkan Peta Strategi Instansi, Rencana Strategi Instansi, Perjanjian Kerja, dan Struktur Organisasi dan Tata Kelola.
3. Mendukung Instansi, Kementerian atau Lembaga Indonesia agar dapat menerapkan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai yang sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS.
4. Menciptakan sistem manajemen kinerja yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi

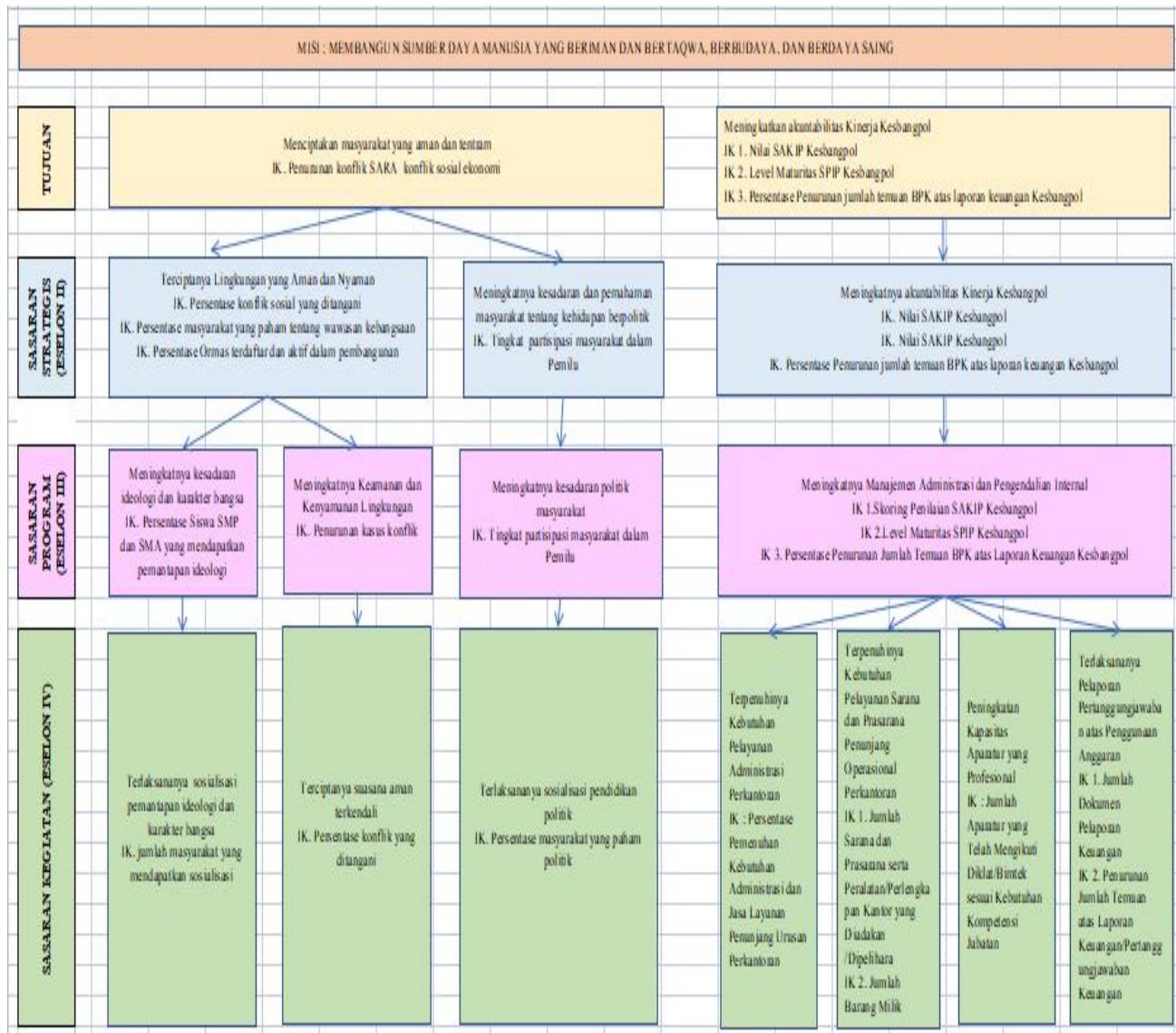
**Gambar 1.**  
**Cascading Renstra Badan Kesatuan Bangsa**  
**dan Politik Tahun 2022**



Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (*causality*), serta memiliki keterkaitan sinergitas (*alignment*)

**Gambar 2.**  
**Cascading Program Badan Kesatuan Bangsa**  
**dan Politik Tahun 2022**



### 1.2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022 berjumlah 51 orang dengan rincian seperti Tabel berikut :

Tabel 1.  
Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

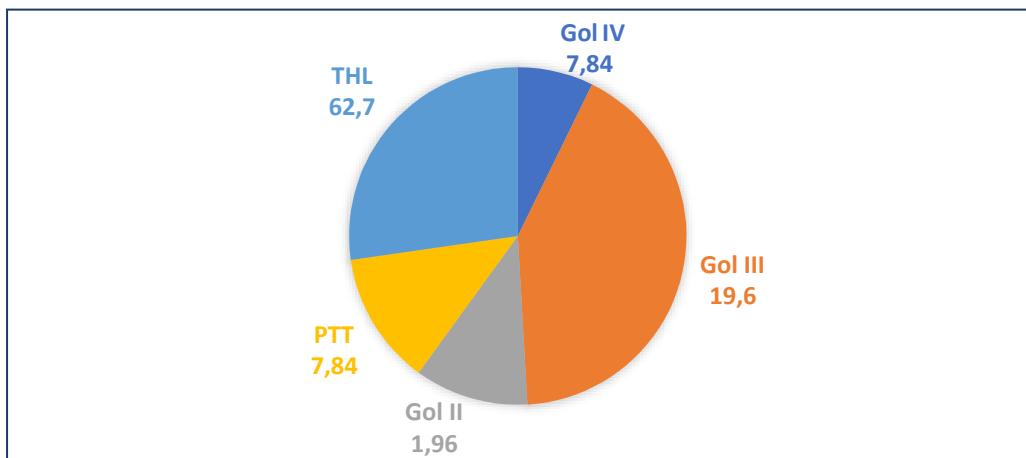
No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki - Laki	Perempuan		
1	IV	3	1	4	7,84
2	III	5	5	10	19,61
3	II	1	-	1	1,96
4	PTT	3	1	4	7,84
5	THL	12	20	32	62,75
Jumlah		24	27	51	100,00

Sumber : Data Olahan Subbag Umum dan Pelaporan Badan Kesbangpol Tahun 2022

Dari tabel diatas terlihat Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik paling banyak terdapat pada THL sebanyak 32 orang atau 62,75 %

Terlihat pada grafik distribusi dibawah ini ;

Gambar 3.  
Data Distribusi Pegawai Menurut Golongan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022



Jika dilihat berdasarkan tingkat Pendidikan, sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat dari table dibawah ini :

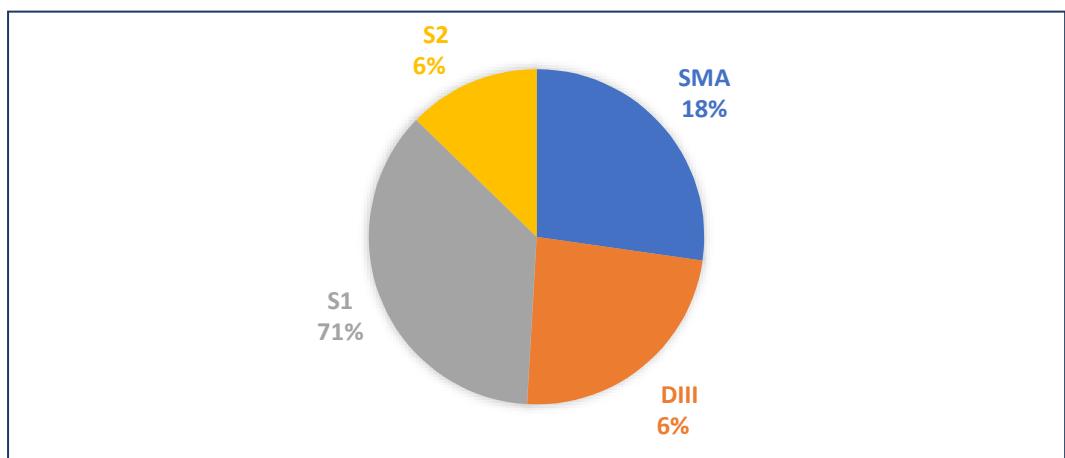
**Tabel 2.**  
**Data Pegawai Menurut Golongan dan Pendidikan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022**

No.	Golongan	Pendidikan				Jumlah
		SMA	D.III	S.1	S.2	
1	IV	0	0	1	3	4
2	III	1	0	9	0	10
3	II	0	1	0	0	1
4	PTT	1	0	3	0	4
5	THL	7	2	23	0	32
Jumlah		9	3	36	3	51
%		17,65	5,88	70,59	5,88	100,00

Sumber : Data Olahan Subbag Umum Badan Kesbangpol Tahun 2022

Dari tabel diatas terlihat Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik paling banyak terdapat pada tingkat Pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 36 orang atau 70,59 %

**Gambar 4**  
**Data Distribusi Pegawai Menurut Pendidikan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022**



### 1.2.3. Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 97 tahun 2021, tugas pokok Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik . Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat.

**Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :**

**(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:**

**1.Kepala Badan**

**2.Sekretaris**

**a. Sub Bagian Umum dan Keuangan**

**b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Program**

**Anggaran dan Keuangan**

**3.Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi,**

**Sosial Budaya dan Agama terdiri atas:**

**a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan**

**b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama**

**4.Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas:**

**a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Politik Dalam Negeri; dan;**

**b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Organisasi Kemasyarakatan.**

**5.Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas:**

**a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerja sama Intelijen; dan**

**b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penanganan Konflik.**

**(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;**

**(3) Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;**

**(4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.**

**(5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dipimpin oleh seorang Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. Sub-Koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat Yang Berwenang**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan di daerah;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

### **1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan**

1. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 - 2026
3. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022

### **1.4. Isu Strategis**

Permasalahan Utama atau Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi

akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain:

1. Melakukan sejumlah sosialisasi dan pembekalan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama serta mencegah menyebarluasnya aliran kepercayaan dan aliran sesat yang menyimpang dari ajaran agama guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
2. Melakukan pembinaan kemampuan masyarakat dalam rangka deteksi dini penanganan masalah konflik sosial dan SARA;
3. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem budaya politik;
5. Pengembangan dan pembinaan kesadaran bela negara, wawasan kebangsaan bagi masyarakat;
6. Membangun komunikasi dan hubungan yang harmonis dengan lembaga vertikal dan daerah;
7. Melakukan pendataan dan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dan ormas;
8. Melakukan pemantauan terhadap orang asing;
9. Melakukan pembinaan terhadap partai politik dalam rangka mewujudkan demokrasi yang baik di Pasaman Barat;
10. Melakukan pelatihan pengembangan kapasitas aparatur di Bidang Kewaspadaan dini;
11. Melakukan penanggulangan terorisme dan radikalisme;
12. Melakukan pelatihan revolusi mental bagi masyarakat.

## II. PERENCANAAN KINERJA

---

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada.

### 2.1. Rencana Strategis 2021 – 2026

#### 2.1.1. Pernyataan Visi dan Misi

Rencana Pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat periode 2021-2026. Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan menjadi tujuan, sasaran, dan kebijakan, dan diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan prioritas pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat tentunya juga memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang dapat mempengaruhi keberhasilan program-program pembangunan di masa mendatang.

Adapun visi dan misi pembangunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 adalah: “*Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera*”

Visi ini mewakili harapan dan impian seluruh lapisan masyarakat Pasaman Barat untuk memperoleh kehidupan yang bermartabat, masyarakat yang mengamalkan ajaran agama dan menjunjung tinggi adat dan budaya lokal, serta masyarakat yang sejahtera dan setidaknya setara dengan masyarakat di daerah lainnya di Propinsi Sumatera Barat atau bahkan di dunia. Dari pernyataan visi tersebut, ada beberapa kata kunci yang menjadi penekanan, yakni: Masyarakat yang Bermartabat, Masyarakat yang Agamais, dan Masyarakat yang Maju dan Sejahtera.

Tabel 3.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi : "Mewujudkan Pasaman Barat yang bermartabat, agamais, maju dan sejahtera"				
No	Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa, Berbudaya, dan Berdaya Saing	Keterbatasan dana untuk mendukung program/kegiatan	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial	Dengan kondisi yang ada, pegawai Badan Kesatuan bangsa dan politik dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas pokoknya dengan rasa tanggungjawab

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Badan Kesbanpol dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif, sesuai dengan misi pertama Kabupaten Pasaman Barat maka pengimplementasian kebijakan Reformasi Biroksi dilaksanakan melalui peningkatan keterampilan dan profesionalisme serta peningkatan pelayanan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun sesuai Renja Badan Kesbangpol Tahun 2022.

Adapun visi pembangunan Pasaman Barat dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

"Mewujudkan Pasaman Barat Yang Bermartabat, Agamis, Maju dan Sejahtera"

Visi tersebut dimaknai sebagai nilai fundamental dari beberapa poin misi, sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif
- 2) Membangun SDM yang mampu mandiri dan memiliki daya saing
- 3) Mewujudkan masyarakat Pasaman Barat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT Mewujudkan pemerintahan yang bersih, professional dan melayani
- 4) Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian masyarakat dan membebaskan daerah terisolir hingga masyarakat mempunyai

- ekonomi yang baik dan berkesinambungan
- 5) Membangun sarana peribadatan yang mampu menunjang peningkatan ibadah menuju ketaqwaan kepada Allah SWT
  - 6) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang mampu menunjang prestasi olah raga pemuda Pasaman Barat
  - 7) Membangun sarana tempat belajar membaca Al-Quran (Pondok Al-Quran)
  - 8) Membangun sarana dan prasarana air bersih sehingga masyarakat mudah mendapatkan air bersih
  - 9) Membangun irigasi guna menunjang percetakan sawah
  - 10) Membangun jalan ke lokasi pertanian masyarakat
  - 11) Membangun jalan yang menghubungkan kejorongan yang berasa di pinggir laut menuju ibu kota kecamatan
  - 12) Membangun sarana dan prasarana yang menunjang ekonomi nelayan sehingga nelayan merasa nyaman untuk melaut
  - 13) Membangun hubungan yang harmonis antara para pengusaha perkebunan dengan masyarakat
  - 14) Meningkatkan upaya menjaga kelestarian hutan, sungai dan laut
  - 15) Peningkatan kualitas sarana kesehatan sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sakit menuju kesembuhan
  - 16) Membangun hubungan yang harmonis dengan partai pengusung dan partai lainnya, sehingga nampak sinergi yang baik dalam melaksanakan pembangunan di Pasaman Barat;
  - 17) Membangun sarana dan prasarana pendidikan hingga mampu meningkatkan sumber daya manusia Pasaman Barat
  - 18) Mewujudkan cita-cita masyarakat Pasaman Barat pada biaya pendidikan gratis sampai tingkat SMP dan memberikan beasiswa saat persiapan skripsi dan wisuda
  - 19) Mewujudkan cita-cita masyarakat yang dapat menikmati kenyamanan dan ketentraman tinggal di Pasaman Barat dan domisili Pasaman Barat

- 20) Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk mendapatkan pengobatan gratis, yang berkualitas dan mudah mendapatkan obat-obatan
- 21) Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak huni
- 22) Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk meningkatkan perekonomian melalui usaha peternakan (sapi, kambing, ayam, dan lain-lain) dan perhatian khusus kepada kejorongan transmigrasi
- 23) Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk meningkatkan ekonomi melalui industry rumah tangga
- 24) Melanjutkan pembangunan pelabuhan Teluk Tapang dan Bandara Pusako Anak Nagari sampai selesai.

Pada Misi Point Pertama yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif; untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat, maka misi yang diusung oleh Pemerintah Daerah pada Tahun 2021-2026 adalah mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional dan inovatif. Tata kelola yang dimaksud termasuk pengelolaan internal pemerintahan secara profesional dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan internal pemerintah mencakup pengelolaan birokrasi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya finansial, pengawasan internal. Birokrasi yang bersih hanya akan tercipta jika didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Birokrasi yang bersih dan efisien juga terwujud dari sistem kerja dan kelembagaan yang efektif, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan optimal.

Sementara itu, pelayanan publik yang berkualitas terwujud dari sistem pelayanan publik yang ringkas, efektif, dan bebas biaya. Hal ini juga hanya dapat diwujudkan dengan ketersediaan sarana dan prasana yang memadai, pemanfaatan teknologi informasi, ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan profesional, serta tersedianya dukungan regulasi yang jelas. Inovasi dari lembaga pemerintahan maupun masyarakat mesti didorong untuk mempercepat tercapainya birokrasi dan pelayanan publik yang profesional.

### 2.1.2. Tujuan Strategis

Tujuan dapat didefinisikan sebagai penjabaran visi dan misi. Secara harfiah, tujuan berarti sesuatu yang akan dicapai oleh organisasi. Dalam konteks pemerintahan, tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi pembangunan dalam jangka waktu tertentu dan merupakan suatu hal yang akan dicapai melalui pembangunan. Tujuan idealnya bersifat kuantitatif dan menjadi ukuran keberhasilan pembangunan.

Sementara itu, sasaran menggambarkan tingkat-tingkat atau tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran bersifat lebih konkret dan operasional. Periode waktunya lebih spesifik, lebih terukur, dan lebih spesifik. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan mesti bersifat SMART, yakni:

- 1) *Specific*, atau spesifik. Perencanaan pembangunan idealnya menghindari hal-hal yang bersifat umum. Tujuan yang hendak dicapai harus jelas dan spesifik.
- 2) *Measurable*; tujuan yang hendak dicapai harus bisa diukur, dan memiliki ukuran yang jelas. Dengan demikian, di akhir periode pembangunan, bisa dilakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan.
- 3) *Action-Oriented*; Orientasi pada tindakan maknanya adalah bahwa tujuan yang dirumuskan harus bisa dilaksanakan.
- 4) *Realistic*. Penentuan target pencapaian tujuan harus realistik, yakni mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan kemampuan untuk mencapainya,
- 5) *Timely*; Maknanya adalah bahwa harus ada penentuan waktu yang jelas kapan sebuah tujuan akan dicapai dan tahapan-tahapan dalam pencapaiannya.

Adapun tujuan pembangunan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat selama periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut ;

*Misi ke-2: Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing*

*Tujuan 2: Mewujudkan masyarakat yang agamais dan berbudaya, aman tentram dan tangguh*

*Sasaran: Masyarakat yang rukun dan berkeadilan*

### **2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan Dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis.

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah (PD) yaitu :

1. **Spesifik;** Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.\
2. **Measurable;** Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. **Achievable;** Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. **Relevant;** Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin ( keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. **Timelines;** Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

**Tabel 4.**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat**  
**Tahun 2021 - 2026**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kesbangpol	Nilai SAKIP Kesbangpol	Hasil Penilaian SAKIP Badan Kesbangpol yang dikeluarkan oleh Inspektorat
		Level Maturitas SPIP Kesbangpol	Hasil Penilaian Level Maturitas SPIP Badan Kesbangpol yang dikeluarkan oleh Inspektorat
		Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK atas laporan keuangan Kesbangpol	Penurunan Temuan BPK atas laporan keuangan Badan Kesbangpol
2	Terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman	Persentase konflik sosial yang ditangani	Jumlah konflik yang ditangani / jumlah konflik yang terjadi dalam 1 tahun
		Persentase siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi	Jumlah siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi / jumlah siswa SMP dan SMA
		Persentase Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan	Jumlah ormas yang terdaftar dan aktif dalam pembangunan / jumlah ormas yang terdaftar
3	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu/masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih

Sumber : Data Subbag Program dan Pelaporan Badan K Tahun 2022

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang

dihadirkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan. Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2022, IKU dan APBD. Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5.**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Tahun 2022**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kesbangpol	Nilai SAKIP Kesbangpol	B
		Level Maturitas SPIP Kesbangpol	Level 3
		Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK atas laporan keuangan Kesbangpol	50
2	Terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman	Persentase konflik sosial yang ditangani	100
		Persentase siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi	5
		Persentase Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan	25
3	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	68

**Tabel 6**  
**Program dan Kegiatan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Tahun 2022**

NO	KEGIATAN
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
II	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah
III	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
IV	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
V	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
10	Pengadaan Mebel
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
VI	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VII	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
B	<b>Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>
VIII	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>
17	Penyusunan program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
18	Perumusan kebijakan teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
19	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran

	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
20	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
C	<b>Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik</b>
IX	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik</b>
21	Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
22	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
D	<b>Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>
X	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>
23	Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
E	<b>Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>
XI	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>
24	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
25	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
F	<b>Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik</b>
XII	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>
26	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
27	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
28	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
29	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
30	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota

Sumber : Data Olahan Subbag Program dan Keuangan Badan Kesbangpol Tahun 2022

### 2.3. Program Kegiatan dan Anggaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Badan Kesbangpol. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 7.**  
**Program/Kegiatan dan Anggaran**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Tahun 2022**

NO	KEGIATAN	Anggaran
		(RP)
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>2.900.957.102</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.108.303.437</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.820.333.437
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	212.350.000
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.620.000
<b>II</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>29.600.000</b>
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	29.600.000
<b>III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>16.474.880</b>
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.474.880
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>387.640.600</b>
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.481.800
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.032.000
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.000.000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	286.126.800
<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>153.329.875</b>
10	Pengadaan Mebel	25.470.500
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.859.375
<b>VI</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>112.223.560</b>
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.548.560
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.675.000
<b>VII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>93.384.750</b>
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.227.500
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.952.250
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.205.000
<b>B</b>	<b>Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>148.639.700</b>
<b>VIII</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi</b>	<b>148.639.700</b>

	<b>Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	
17	Penyusunan program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	57.882.700
18	Perumusan kebijakan teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	66.337.000
19	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	18.270.000
20	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6.150.000
<b>C</b>	<b>Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik</b>	1.246.162.124
<b>IX</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik</b>	1.246.162.124
21	Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	76.416.700
22	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.169.745.424
<b>D</b>	<b>Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	123.954.200
<b>X</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	123.954.350
23	Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	123.954.350
<b>E</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	273.332.200
<b>XI</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	273.332.200
24	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	160.477.000
25	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	112.855.200
<b>F</b>	<b>Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik</b>	863.306.388
<b>XII</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	863.306.388
27	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	94.969.250

	kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
28	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	79.830.300
29	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	688.506.838

Sumber : Data Olahan Subbag Program dan Pelaporan Badan Kesbangpol Tahun 2022

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

---

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel 8.**  
**Skala Pengukuran Kinerja**  
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi
3	$65,1 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indicator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat dilakukan dengan membandingkan antar target kinerja dengan realisasi kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 7 indikator kinerja utama Badan Kesbangpol Tahun 2022, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 95,24%.

**Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut**

**Tabel 9  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kesbangpol	Nilai SAKIP Kesbangpol	65%	77%	118,46%
		Level Maturitas SPIP Kesbangpol	2,35	3,13	133,19%
		Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK atas laporan keuangan Kesbangpol	50%	50%	100%
2	Terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman	Persentase konflik sosial yang ditangani	100%	100%	100%
		Persentase siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi	5%	0.03%	0.6%
		Persentase Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan	25%	60%	240%
3	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	68%	68%	100%
Capaian Rata-rata Kinerja					113,18%

*Sumber : Data Olahan Subbag Program dan Pelaporan Badan Kesbangpol Tahun 2022*

**Pada tabel dibawah adalah perbandingan capaian pada 1 (satu) tahun terakhir pada level tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022.**

**Tabel 10.**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Tahun 2021 - 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021			Tahun 2022			Perbandingan		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol	Nilai SAKIP Kesbangpol	65%	65%	100%	65%	77%	118,46%	0%	12%	18,46%
		Level Maturitas SPIP Kesbangpol	2,15%	2,35%	109,30%	2,35	3,13%	133,19%	0,20%	0,78%	23,89%
		Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK atas laporan keuangan Kesbangpol	50%	50%	100%	50%	50%	100%	0%	0%	0%
2	Terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman	Presesntasi konflik sosial yang ditangani	-	-	-	100 %	100%	1000%	100 %	100%	1000%
		Persentase siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi	-	-	-	5%	0,03%	0,6%	5%	0,03%	0,6%
		Persentase Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan	-	-	-	25 %	60%	240%	25 %	60%	240%
3	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	68%	68%	100%	68%	68%	100,00%	0%	0%	0%
Capaian Rata-rata Kinerja					102,32%			113,18%			10,86%

Sumber : Data Olahan Subbag Program dan Pelaporan Badan Kesbangpol Tahun 2022

Pada tabel diatas terlihat adanya peningkatan capaian kinerja pada tahun 2022 pada setiap indikator kinerja dengan selisih capaian rata-rata kinerja sebanyak 10,86%.

**Tabel 11.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Badan Kesbangpol**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2022	% Capaian Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol	Nilai SAKIP Kesbangpol	77%	65%	118,46%	Sudah tercapai
		Level Maturitas SPIP Kesbangpol	3,13%	2,35	133,19%	Sudah tercapai
		Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK atas laporan keuangan Kesbangpol	50%	50%	100%	Sudah tercapai
2	Terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman	Presesntasi konflik sosial yang ditangani	100%	100%	100%	Sudah tercapai
		Persentase siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi	0,03%	5%	0,6%	Belum tercapai
		Persentase Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan	60%	25%	240%	Sudah tercapai
3	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	68%	68%	100%	Sudah tercapai
Capaian Rata-rata Kinerja					113,18%	

Sumber : Data Olahan Subbag Program dan Pelaporan Badan Kesbangpol Tahun 2022

Dari beberapa sasaran strategis terlihat ada satu indikator yang belum mencapai target akhir renstra yaitu Persentase siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi yang masih akan dijalankan sampai tahun 2026. Membutuhkan banyak perbaikan dan inovasi untuk mencapai target kinerja yang telah direncanakan pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat .

**Tabel 12.**  
**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022**

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol	Nilai SAKIP Kesbangpol	77%	65%	118,46%				
		Level Maturitas SPIP Kesbangpol	3,13%	2,35	3,13%				
		Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK atas laporan keuangan Kesbangpol	50%	50%	50%	2.900.957.102	2.671.268.686	92,08 %	7,92 %
2	Terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman	Presesentasi konflik sosial yang ditangani	100%	100 %	100%	1.136.638.588	1.028.824.559	90,52 %	9,48 %
		Persentase siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi	0.03%	5%	0.6%	148.639.700	142.923.500	96,15 %	3,85 %
		Persentase Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan	60%	25 %	240%	123.954.200	122.288.627	98,66 %	1,34 %
3	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	68%	68%	100%	1.246.162.124	1.242.140.274	99,68 %	0.32 %
<b>Capaian Rata-rata Kinerja</b>					<b>113.18%</b>	<b>5.556.351.714</b>	<b>5.207.445.646</b>	<b>90,48 %</b>	<b>9,52 %</b>

Sumber : Data Olahan Subbag Program dan Pelaporan Badan Kesbangpol Tahun 2022

Dari pelaksanaan Anggaran yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat selama Tahun 2022 guna mencapai Target Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat efisiensi terhadap pemakaian Dana sebesar Rp. 348.906.068,00 - (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah,- ) atau sebesar 9,52 % dari total anggaran tahun 2022.

Penjelasan dan analisa pencapaian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada masing – masing sasaran dan indikator adalah sebagai berikut :

### 3.1.1. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kesbangpol IKU

#### A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

**Tabel 13**  
**Capaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol**  
**Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol	Nilai SAKIP	77%	65%	118,46%
		Level Maturitas SPIP	3,13%	2,35	3,13%
		Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK atas laporan keuangan Kesbangpol	50%	50%	50%

*Sumber : Data Olahan Subbag Program dan Pelaporan Badan Kesbangpol Tahun 2022*

Untuk pencapaian kinerja pada sasaran diatas terkait dukungan OPD terhadap capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang diukur melalui penilaian terhadap pelaksanaan SAKIP dan SPIP OPD serta upaya dalam penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Badan Kesbangpol, maka secara garis besar tercapai dengan penilaian yang termasuk kategori sangat baik (tercapai melebihi target yang ditetapkan).

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Tahun 2021 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah Nomor 700/08/LHE/Inspekt./2021 menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol memperoleh nilai BB. begitupun pada evaluasi SPIP dan upaya terhadap penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Badan Kesbangpol juga tercapai dengan realisasi sesuai target (100%).

#### B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Pada tabel dibawah adalah perbandingan capaian pada 1(satu) tahun terakhir pada level tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022Adapun hal-hal yang menyebabkan kenaikan dan penurunan pada setiap indikator tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 14.**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Tahun 2021 - 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021			Tahun 2022			Perbandingan		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol	Nilai SAKIP Kesbangpol	65%	65%	100%	65%	77%	118,46%	0%	12%	18,46%
		Level Maturitas SPIP Kesbangpol	2,15%	2,35%	109,30%	2,35	3,13%	133,19%	0,20%	0,78%	23,89%
		Percentase Penurunan Jumlah Temuan BPK atas laporan keuangan Kesbangpol	50%	50%	100%	50%	50%	100%	0%	0%	0%

*Sumber : Data Olahan Subbag Program dan Pelaporan Bdan Kesbangpol Tahun 2022*

Nilai akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol tahun 2022 mengalami peningkatan. Pada indikator ini didukung Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2021 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah Nomor 700/08/LHE/Inspekt./2021 menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol memperoleh nilai BB. begitupun pada evaluasi SPIP dan upaya terhadap penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Badan Kesbangpol juga tercapai dengan realisasi sesuai target (100%).

#### C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Badan Kesbangpol

**Tabel 15.**  
**Perbandingan Realisasi Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Badan Kesbangpol**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2022	% Capaian Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol	Nilai SAKIP Kesbangpol	77%	65%	118,46%	Sudah tercapai
		Level Maturitas SPIP Kesbangpol	3,13%	2,35	133,19%	Sudah tercapai
		Percentase Penurunan Jumlah Temuan BPK atas laporan keuangan Kesbangpol	50%	50%	100%	Sudah tercapai

*Sumber : Data Olahan Subbag Program dan Pelaporan BAdan Kesbangpol Tahun 2022*

Pada tabel diatas terlihat bahwa persentase pencapaian adalah 100 % yang artinya setiap indikator sudah mencapai target.

#### D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator indeks kepuasan layanan kepegawaian yang terletak pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.

**Tabel 16.**  
**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kesbangpol**  
**Tahun 2022**

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol	Nilai SAKIP Kesbangpol	77%	65%	118,46%				
		Level Maturitas SPIP Kesbangpol	3,13%	2,35	3,13%				
		Persentase Penurunan Jumlah Temuan BPK atas laporan keuangan Kesbangpol	50%	50%	100%	2.900.957.102	2.671.268.686	92,08 %	7,92 %

Sumber : Data Olahan Subbag Program dan Pelaporan Tahun 2022

Dengan persentase capaian 100% sumber daya yang digunakan terealisasi sebanyak 92,08% atau Rp. 2.671.268.686,- dari Rp.2.900.957.102 dengan tingkat efisiensi 7,92%.

#### E. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama maka sesuai Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021 – 2026 maka disusun program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan kinerja tersebut. Berikut ini adalah uraian yang mendukung atau menghambat sasaran akuntabilitas kinerja kesbangpol pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 ;

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini terdiri dari 3 (tiga) jenis kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Terlaksananya kegiatan penyediaan pelayanan administrasi keuangan tahun 2022 dengan pagu dana sebesar Rp. 2.108303.437,-
  - b. Realisasi pelaksanaan program dan Kegiatan, realisasi fisik 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.895.199.122 ,-(terrealisasi 89,89%).
  - c. Permasalahan dan Solusi  
  
Dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Pelayanan administrasi Perkantoran tahun 2022 secara keseluruhan tidak ada kendala yang signifikan, semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.
2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

a. Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah tahun 2022 dengan pagu dana sebesar Rp. 29.600.000,-

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi fisik 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp.209.503.000,- (*terrealisasi 99,67 %*).

c. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah tahun 2022 secara keseluruhan tidak ada kendala yang signifikan, semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

3. Kegiatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tahun 2022 dengan pagu dana sebesar Rp.16.474.880,-

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi fisik 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.616.500,- (*terrealisasi 64,44 %*).

c. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tahun 2022 secara keseluruhan tidak ada kendala yang signifikan, semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

4. Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2022 dengan pagu dana sebesar Rp.387.640.600,-

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi fisik 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 386.682.836,- (*terrealisasi 99,75 %*).

c. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2022 secara keseluruhan tidak ada kendala yang signifikan, semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

5. Kegiatan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2022 dengan pagu dana sebesar Rp.153.329.875,-

b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi fisik 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 153.183.000,- (*terrealisasi 99,90 %*).

c. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2022 secara keseluruhan tidak ada kendala yang signifikan, semua kegiatan terlaksana dengan

baik dan optimal.

6. Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2022 dengan pagu dana sebesar Rp.112.223.560,-
  - b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi fisik 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 107.791.228,- (*terrealisasi* 99,05 %).
  - c. Permasalahan dan Solusi  
Dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2022 secara keseluruhan tidak ada kendala yang signifikan, semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.
7. Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2022 dengan pagu dana sebesar Rp.93.384.750,-
  - b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi fisik 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 88.293.000,- (*terrealisasi* 94,55 %).
  - c. Permasalahan dan Solusi  
Dalam pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2022 secara keseluruhan tidak ada kendala yang signifikan, semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

### 3.1.2. Sasaran : Terciptanyan Lingkungan yang Aman dan Nyaman

Pencapaian target kinerja indikator persentase konflik sosial yang ditangani diukur melalui jumlah konflik yang ditangani dibandingkan dengan jumlah konflik yang terjadi dalam 1 tahun. Hasil evaluasi terhadap capaian Persentase konflik sosial yang ditangani memberikan hasil yang dikategorikan sangat baik.

Pencapaian target kinerja indikator persentase masyarakat yang paham tentang wawasan kebangsaan yang diukur melalui Jumlah siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi dibandingkan dengan jumlah siswa SMP dan SMA. Hasil evaluasi terhadap capaian persentase masyarakat yang paham tentang wawasan kebangsaan memberikan hasil yang dikategorikan buruk. Karena dari target 5% hanya tercapai 0,03%. Dapat dijelaskan bahwa indikator persentase masyarakat yang paham tentang wawasan kebangsaan realisasi capaianya 0,0042 disebabkan keterbatasan anggaran, sedangkan jumlah siswa SMP dan SMA tahun 2021 sebanyak 48.120 orang, sehingga realisasi capaianya kecil.

Pencapaian target kinerja indikator persentase Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan melalui Jumlah Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan dibandingkan jumlah ormas yang terdaftar. Hasil evaluasi terhadap capaian persentase Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan memberikan hasil yang dikategorikan baik.

#### A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Indikator persentase konflik sosial yang ditangani diukur melalui menggambarkan Jumlah konflik yang ditangani dibandingkan dengan jumlah konflik yang terjadi dalam 1 tahun. Indikator persentase masyarakat yang paham tentang wawasan kebangsaan menggambarkan Jumlah siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi dibandingkan dengan jumlah siswa SMP dan SMA. Hasil evaluasi terhadap capaian persentase masyarakat yang paham tentang wawasan kebangsaan memberikan hasil yang dikategorikan buruk. Karena dari target 5% hanya tercapai 0,03%. Dapat dijelaskan bahwa indikator persentase masyarakat yang paham tentang wawasan kebangsaan realisasi capaiannya 0,0042 disebabkan keterbatasan anggaran, sedangkan jumlah siswa SMP dan SMA tahun 2021 sebanyak 48.120 orang, sehingga realisasi capaiannya kecil. Pencapaian target kinerja indikator persentase Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan menggambarkan Jumlah Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan dibandingkan jumlah ormas yang terdaftar.

**Tabel 17.**  
**Capaian Sasaran Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Nyaman**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
2	Terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman	Persentase konflik sosial yang ditangani	100%	100%	100%
		Persentase siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi	5%	0.03%	0.6%
		Persentase Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan	25%	60%	240%

*Sumber : Data Olahan Subbag Program dan Pelapran Badan Kesbangpol Tahun 2022*

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa indeks persentase konflik yang ditangani menunjukkan capaian 100% yang artinya target yang ditetapkan dapat dicapai dengan sangat baik. Indikator persentase masyarakat yang paham tentang wawasan kebangsaan menggambarkan Jumlah siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi dibandingkan dengan jumlah siswa SMP dan SMA. Hasil evaluasi terhadap capaian persentase masyarakat yang paham tentang wawasan

kebangsaan memberikan hasil yang dikategorikan buruk. Karena dari target 5% hanya tercapai 0,03%. Dapat dijelaskan bahwa indikator persentase masyarakat yang paham tentang wawasan kebangsaan realisasi capaiannya 0,0042 disebabkan keterbatasan anggaran, sedangkan jumlah siswa SMP dan SMA tahun 2021 sebanyak 48.120 orang, sehingga realisasi capaiannya kecil. Pencapaian target kinerja indikator persentase Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan melalui Jumlah Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan dibandingkan jumlah ormas yang terdaftar. Hasil evaluasi terhadap capaian persentase Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan memberikan hasil yang dikategorikan baik.

**B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021**

**Tabel 18.**  
**Perbandingan Realisasi Sasaran Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Nyaman**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Tahun 2021 – 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021			Tahun 2022			Perbandingan		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
2	Terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman	Presesentasi konflik sosial yang ditangani	-	-	-	100 %	100%	1000%	100 %	100%	1000%
		Persentase siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi	-	-	-	5%	0.03%	0.6%	5%	0.03%	0.6%
		Persentase Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan	-	-	-	25 %	60%	240%	25 %	60%	240%

*Sumber : Data Olahan Subbag Program dan Pelaporan Badan Kesbangpol Tahun 2022*

Pada tahun 2021 indeks capaian kinerja Badan kesbangpol adalah angka kriminalitas sehingga tidak dapat dibandingkan dengan indeks capaian kinerja pada tahun 2022, namun secara umum dapat digambarkan sebagaimana tabel diatas. Semua indikator memiliki tingkat capaian yang baik kecuali indeks persentase siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi yang hanya memperoleh capaian 0,6 % dari target 5% yang diharapkan hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran mengingat jumlah siswa SMP dan SMA di Pasaman Barat yang cukup banyak sehingga tidak terintegrasi ke dalam dana yang ada.

**C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Badan Kesbangpol**

Pada indikator Indeks Profesionalitas ASN terlihat persentase realisasi pada tabel dibawah ini :

**Tabel 19.**  
**Perbandingan Realisasi Sasaran Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Nyaman**  
**Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah**  
**Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Badan Kesbangpol**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2022	% Capaian Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
2	Terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman	Presesentasi konflik sosial yang ditangani	100%	100%	100%	Sudah tercapai
		Persentase siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi	0.03%	5%	0.6%	Belum tercapai
		Persentase Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan	60%	25%	240%	Sudah tercapai

Sumber : Data Olahan Subbag Program dan Pelaporan Badan Kesbangpol Tahun 2022

Target pada renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 adalah sebanyak 100%, dengan persentase pencapaian sebanyak 100 %. Hal ini menunjukan bahwa realisasi capaian yang sangat baik

#### D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan efesiensi penggunaan sumber daya pada indikator indeks kepuasan layanan kepegawaian yang terletak pada Program Kepegawaian Daerah :

**Tabel 20.**  
**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Pada Sasaran Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Nyaman**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022**

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
2	Terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman	Presesentasi konflik sosial yang ditangani	100%	100 %	100%	1.136.638.588	1.028.824.559	90,52 %	9,48 %
		Persentase siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi	0.03%	5%	0.6%	148.639.700	142.923.500	96,15 %	3,85 %
		Persentase Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan	60%	25 %	240%	123.954.200	122.288.627	98,66 %	1,34 %

Sumber : Data Olahan Subbag Program dan Pelaporan Badan Kesbangpol Tahun 2022

#### E. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Ada beberapa program /kegiatan untuk mencapai kinerja indikator indeks profesionalitas ASN, yaitu :

##### A. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :

- 1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**
  - a. Kegiatan ini merupakan pemberian sosialisasi Revolusi Mental
  - b. Realisasi Kegiatan

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 57.882.700,- dan realisasi sebesar Rp. 56.318.800,- atau 97,30 % dengan realisasi fisik sebanyak 100 %.
  - c. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.
- 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**
  - a. Realisasi Kegiatan

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 66.337.000,- dan realisasi sebesar Rp. 62.387.300,- atau 94,05 % dengan realisasi fisik sebanyak 100 %
  - b. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.
- 3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**
  - a. Realisasi Kegiatan

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 18.270.000,- dan realisasi sebesar Rp. 18.067.400,- atau 44,11 % dengan realisasi fisik sebanyak 98,89 %
  - b. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.
- 4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**
  - a. Realisasi Kegiatan

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 6.150.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.150.000,- atau 100 % dengan realisasi fisik sebanyak 100 %

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

B. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya A

Program ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

a. Realisasi Kegiatan

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 160.477.000,- dan realisasi sebesar Rp. 142.261.150,- atau 88,65 % dengan realisasi fisik sebanyak 100 %.

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

a. Realisasi Kegiatan

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 112.855.200,- dan realisasi sebesar Rp. 106.463.232,- atau 94,34 % dengan realisasi fisik sebanyak 100 %.

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

C. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Penanganan Konflik Sosial

Program ini terdiri dari 3(tiga) Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

a. Realisasi Kegiatan

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 94.969.250,- dan realisasi sebesar Rp. 81.650.400,- atau 85,98 % dengan realisasi fisik sebanyak 100 %.

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
  - a. Realisasi Kegiatan

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 79.830.300,- dan realisasi sebesar Rp. 71.231.000,- atau 89,23 % dengan realisasi fisik sebanyak 100 %.

- a. Realisasi Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

3. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Realisasi Kegiatan

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 688.506,838- dan realisasi sebesar Rp. 627.218.777,- atau 91,10 % dengan realisasi fisik sebanyak 100 %.

- a. Realisasi Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

#### **D. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

1. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

- a. Realisasi Kegiatan

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 123.954.200- dan realisasi sebesar Rp. 122.288.627,- atau 98,66 % dengan realisasi fisik sebanyak 100 %.

- a. Realisasi Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

**3.1.3. Sasaran : Meningkatnya Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik  
IKU**

**A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

**Tabel 21.  
Capaian Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
3	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	68%	68%	NA

*Sumber : Data Olahan Subbag Program dan Keuangan Tahun 2022*

Untuk pencapaian indeks persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak dapat dilakukan penilaian setiap tahun, karena pemilu atau pilkada tidak dilakukan setiap tahun. Indikator program tersebut telah tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat sehingga tidak dapat diubah. Jadi untuk pengukuran indeks Persentase masyarakat dalam pemilu setiap tahunnya diukur dengan menggunakan indikator turunan yaitu indikator dari kegiatan yakni Jumlah peserta sosialisasi. Diukur menggunakan rumus  $\frac{\text{Jumlah Peserta Sosialisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ . setelah diukur menggunakan rumus tersebut menunjukkan bahwa peserta sosialisasi telah mencapai target sehingga dapat didefinisikan bahwa program tersebut berjalan dengan baik.

**B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021**

Untuk dapat melihat keberhasilan atau tidaknya suatu kinerja dalam jangka waktu tertentu dapat dilihat dari table dibawah ini :

**Tabel 22.  
Perbandingan Realisasi Capaian Persentase Indeks Partisipasi Masyarakat  
Dalam Pemilu Tahun 2021 - 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021			Tahun 2022			Perbandingan		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
3	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	68%	68%	NA	68%	68%	NA	0	0	NA

*Sumber : Data Olahan Subbag Program dan Keuangan Tahun 2022*

Pengukuran tingkat realisasi tersebut diukur menggunakan indikator turunan dari kegiatan dengan menggunakan rumus  $\frac{\text{Jumlah Peserta Sosialisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$  yang mana hasilnya telah mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indeks Partisipasi Masyarakat dalam pemilu sangat baik.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Badan Kesbangpol

Dokumen rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan acuan untuk mencapai target kinerja, yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 23.  
Perbandingan Realisasi Persentase Masyarakat dalam Pemilu Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Badan Kesbangpol

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2022	% Capaian Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
3	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	68%	68%	NA	Sudah tercapai

Sumber : Data Olahan Subbag Program dan Keuangan Tahun 2022

Realisasi tersebut diukur menggunakan indikator turunan dari kegiatan dengan menggunakan rumus  $\frac{\text{Jumlah Peserta Sosialisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$  yang mana hasilnya telah mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indeks Partisipasi Masyarakat dalam pemilu sangat baik. Pada kolom perbandingan tidak didapatkan perbedaan dikarenakan setiap tahunnya program tersebut yang keberhasilannya diukur menggunakan indikator turunan memperoleh hasil yang baik.

D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk menunjang tercapainya salah satu indikator kinerja utama yaitu Persentase masyarakat dalam pemilu maka direncanakan sumber daya yang realiasasi dan efisien penggunaannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 24.**  
**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Pada Persentase masyarakat dalam pemilu Badan Kesatuan**  
**Bangsa dan Politik Tahun 2022**

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
3	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	68%	68%	100%	1.246.162.124	1.242.140.274	99,68 %	0,32 %

Dengan pencapaian indikator kinerja sebesar 100 % dengan pagu anggaran Rp.1.246.162.124,- dana yang terserap adalah Rp. 1.242.140.274,- . Nilai efisiensi sumber daya pada indikator ini adalah 0,32 %.

**E. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program Peningkatan Peran partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Program ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan, yakni :

1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

a. Realisasi Kegiatan

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 76.146.700,- dan realisasi sebesar Rp. 75.132.300,- atau 98,32 % dengan realisasi fisik sebanyak 100 %.

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

a. Realisasi Kegiatan

Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 1.169.745.424,- dan realisasi sebesar Rp. 1.167.007.974,- atau 99,77 % dengan realisasi fisik sebanyak 100 %.

## b. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

### 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa pengukuran kinerja merupakan elemen penting akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang juga harus dibarengi dengan akuntabilitas keuangan. Pencapaian target kinerja organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh penganggaran harus diinformasikan dengan jelas guna kepentingan penganggaran di masa mendatang.

Pada Tahun Anggaran 2022, Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dianggarkan sebesar Rp. 5.556.351.714,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.258.043.871,00 atau 93,72% Belanja Pegawai Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 1.895.953.437,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.688.799.122,00 atau 89,00 % dari anggaran. Belanja pegawai ini merupakan total belanja pegawai dari belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp.2.000.305.214,00 Belanja Pegawai tahun 2022 turun sebesar Rp. 311.506.092,00 atau 16,00%. Turunnya realisasi belanja pegawai disebabkan karena adanya perubahan besaran anggaran belanja tunjangan berdasarkan beban kerja sesuai dengan perubahan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang TPP.

Tabel 25.  
Realisasi Program dan Anggaran  
Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022

NO	KEGIATAN	Anggaran	REALISASI			
			FISIK		KEUANGAN	
			(RP)	(%)	(Rp)	(%)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	2.900.957.102	95.44	2,687,676,888	95.44	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.108.303.437	92.14	2,198,655,214	92.14	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.820.333.437	91.58	1,943,295,214	91.58	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	212.350.000	95.71	198,350,000	95.71	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.620.000	99.70	57,010,000	99.70	
II	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.600.000	100.00	17,350,000	100.00	
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	29.600.000	100.00	17,350,000	100.00	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.474.880	22.80	5,835,800	22.80	
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.474.880	22.80	5,835,800	22.80	

{V}	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	387.640.600	<b>97.71</b>	<b>330,258,392</b>	<b>195.42</b>
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.481.800	99.73	60,218,700	99.73
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.032.000	96.57	11,374,500	96.57
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.000.000	81.73	23,648,000	81.73
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	286.126.800	96.91	235,017,192	96.91
<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	153.329.875	<b>99.94</b>	<b>12,118,000</b>	<b>99.94</b>
<b>10</b>	Pengadaan Mebel	25.470.500	99.94	12,118,000	99.94
<b>11</b>	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.859.375	<b>72.47</b>	<b>58,532,482</b>	<b>72.47</b>
<b>VI</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	112.223.560	73.73	33,318,482	73.73
<b>12</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.548.560	70.87	25,214,000	70.87
<b>13</b>	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.675.000	<b>82.82</b>	<b>64,927,000</b>	<b>82.82</b>
<b>VII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	93.384.750	83.12	33,736,750	83.12
<b>14</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.227.500	87.81	18,335,250	87.81
<b>15</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.952.250	75.93	12,855,000	75.93
<b>16</b>	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.205.000	<b>86.81</b>	<b>76,124,300</b>	<b>86.81</b>
<b>B</b>	<b>Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	148.639.700	<b>86.81</b>	<b>76,124,300</b>	<b>86.81</b>
<b>VIII</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	148.639.700	86.81	76,124,300	86.81
<b>17</b>	Penyusunan program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	57.882.700	-	-	-
<b>18</b>	Perumusan kebijakan teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	66.337.000	<b>99.04</b>	<b>1,149,710,324</b>	<b>99.04</b>
<b>19</b>	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	18.270.000	<b>99.04</b>	<b>1,149,710,324</b>	<b>99.04</b>
<b>20</b>	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6.150.000	97.18	28,432,100	97.18

C	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1.246.162.124	99.09	1,121,278,224	99.09
IX	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik	1.246.162.124	94.12	88,335,250	94.12
21	Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	76.416.700	94.12	88,335,250	94.12
22	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.169.745.424	94.12	88,335,250	94.12
D	Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	123.954.200	79.64	173,437,050	79.64
X	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	123.954.350	79.64	173,437,050	79.64
23	Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	123.954.350	65.27	68,280,800	65.27
E	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya	273.332.200	92.93	105,156,250	92.93
XI	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	273.332.200	76.27	569,226,900	76.27
24	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	160.477.000	76.27	569,226,900	76.27
25	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	112.855.200	88.83	520,964,500	88.83
F	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik	863.306.388	30.20	48,262,400	30.20
XII	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	863.306.388	95.44	2,687,676,888	95.44

27	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	94.969.250	<b>92.14</b>	<b>2,198,655,214</b>	<b>92.14</b>
28	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	79.830.300	91.58	1,943,295,214	91.58
29	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	688.506.838	95.71	198,350,000	95.71

## IV. PENUTUP

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah mendukung pelaksanaan good governance untuk melaporkan capaian kinerja dan keuangan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. LKjIP sebagai cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah karena menilai rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran yang terukur serta berkelanjutan. Selain itu LKjIP juga alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan dalam menjalankan Tujuan dan Sasaran strategis sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi dalam mengemban jabatan yang diamanahkan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Dalam rangka mewujudkan sasaran Badan Kesbangpol tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan 6 program, 12 kegiatan dan 28 sub kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung pencapaian 3 sasaran yang dijabarkan kedalam 7 indikator sesuai Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026.

Hasil capaian atas 7 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah seperti berikut :

- 1) Terlaksana dengan prediket “sangat baik” sebanyak 6 indikator;
- 2) Terlaksana dengan prediket “kurang” sebanyak 1 indikator;

Belum optimalnya pencapaian target indikator kinerja sasaran disebabkan oleh tahun 2022 masih dalam kondisi pandemi sehingga pelaksanaan upacara peringatan hari-hari besar belum bisa dilaksanakan secara optimal dan berimbas pada terhambatnya upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Untuk meningkatkan kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini adalah dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas/kapasitas sumber daya aparatur melalui kegiatan bimbingan teknis perencanaan dan teknis yang mendukung tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Simpang Empat, Februari 2023  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Pasaman Barat



DENI HIRAWAN, S.Pd  
PEMBINA TK. I/ IVb  
NIP. 19660403 199103 1 009



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEFI IRAWAN, S.Pd**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **II. HAMSUARDI**

Jabatan : Bupati Pasaman Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Simpang Empat, September 2022  
PIHAK KEDUA,  
KEPALA BADAN KESBANGPOL  
PIHAK KESATU,  
BUPATI PASAMAN BARAT  
DEFI IRAWAN, S.Pd  
PEMBINA Tk.I/IVb  
NIP. 19660403 199103 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terciptanya Lingkungan yang Aman dan Nyaman	Persentase konflik sosial yang ditangani	100
		Persentase siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi	5
		Persentase Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan	25
2	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	68
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kesbangpol	Nilai SAKIP Kesbangpol	B
		Tingkat Maturites SPIP Kesbangpol	Level 3
		Persentase Penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Kesbangpol	50

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.752.583.903	
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	132.622.700	
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.247.862.124	
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	102.197.850	
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya	161.907.700	
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	1.134.751.838	
	<b>Jumlah</b>	<b>5.531.926.115</b>	

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. HAMSUARDI

Simpang Empat, September 2022

KERATAN BADAN KESBANGPOL



DEFTIRAWAN, S.Pd

PEMBINA Tk.I/IVb

NIP. 19660403 199103 1 009